

**PERDAGANGAN LINTAS NEGARA KOMODITAS PERKEBUNAN
VIA PLBN ARUK: STUDI EKSPORTASI KARET DAN
KELAPA SAWIT DARI KABUPATEN SAMBAS,
EVALUASI KEBIJAKAN BEA CUKAI ARUK, DAN
PROYEKSI PERTUMBUHAN SEKTOR PERKEBUNAN
MELALUI AGRIBISNIS BILATERAL**

Rafika Sari

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: sarirafika893@gmail.com

Oskar Hutagaluh

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: oskarhutagaluh@unissas.ac.id

Desi Yuniarti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: desiyuniarti777@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Aruk PLBN in cross-border trade of plantation commodities, evaluate customs and excise policies, and project the growth of the plantation sector thru Indonesia-Malaysia bilateral agribusiness. The research uses a descriptive qualitative approach with secondary data and policy analysis. The research results indicate that the utilization of the Aruk PLBN as an export route for rubber and palm oil is not yet optimal due to limitations in infrastructure, regulations, and cross-border policy harmonization. However, the plantation sector in Sambas Regency has positive growth prospects thru the strengthening of bilateral agribusiness cooperation.

Keywords: Cross-Border Trade, PLBN Aruk, Rubber, Palm Oil, Bilateral Agribusiness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PLBN Aruk dalam perdagangan lintas negara komoditas perkebunan, mengevaluasi kebijakan bea dan cukai, serta memproyeksikan pertumbuhan sektor perkebunan melalui agribisnis bilateral Indonesia-Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan PLBN Aruk sebagai jalur ekspor karet dan kelapa sawit belum optimal akibat

keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan harmonisasi kebijakan lintas negara. Namun, sektor perkebunan Kabupaten Sambas memiliki prospek pertumbuhan yang positif melalui penguatan kerja sama agribisnis bilateral.

Kata Kunci: PLBN Aruk, perdagangan lintas negara, karet, kelapa sawit, agribisnis bilateral.

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan negara memiliki peran strategi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, Khususnya melalui penguat perdagangan lintas negara. Dalam situasi Indonesia, kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai wilayah terluar yang berfungsi menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai ruang ekonomi kapasitas yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menempatkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu pengutamaan nasional, salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Salah satu PLBN yang memiliki posisi strategis adalah PLBN Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. PLBN Aruk dibangun dengan konsep pelayanan terpadu yang mencakup fungsi kepabeanan, imigrasi, dan karantina (CIQ) guna mendukung kelancaran aktivitas orang dan barang lintas negara. Keberadaan PLBN Aruk diharapkan mampu menjadi pintu gerbang perdagangan resmi yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat integrasi ekonomi Indonesia-Malaysia.

Kabupaten Sambas sendiri merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, khususnya di sektor perkebunan. Komoditas karet dan kelapa sawit menjadi dua komoditas unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Secara geografis, kedekatan wilayah Sambas dengan pasar Malaysia memberikan peluang besar bagi pengembangan ekspor komoditas perkebunan melalui jalur darat yang lebih efisien dibandingkan jalur laut atau pelabuhan besar di luar daerah. Meskipun demikian, potensi tersebut Belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Hingga saat ini, pemanfaatan PLBN Aruk Sebagai jalur resmi ekspor komoditas perkebunan, khususnya karet dan kelapa sawit, masih relatif terbatas Aktivitas perdagangan lintas batas yang berlangsung cenderung didominasi oleh perdagangan skala kecil dan komoditas perkebunan dalam jumlah komersial masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek infrastruktur, regulasi, maupun kelembagaan.

Salah satu aspek penting yang memengaruhi optimalisasi perdagangan lintas negara adalah kebijakan bea dan cukai. Kebijakan

kepabeanaan berperan sebagai instrumen negara dalam mengatur arus barang lintas batas, memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, serta mendorong kegiatan ekspor yang legal dan kompetitif. Di kawasan perbatasan seperti PLBN Aruk, efektivitas kebijakan bea dan cukai sangat menentukan minat pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan jalur perdagangan resmi. Prosedur yang kompleks, keterbatasan fasilitas ekspor, serta belum terintegrasinya sistem perdagangan lintas negara dapat menjadi hambatan bagi pengembangan ekspor komoditas perkebunan.

Selain faktor domestik, perdagangan lintas negara melalui PLBN Aruk juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dan kebijakan bilateral Indonesia-Malaysia. Perbedaan kebijakan, standar perdagangan, serta pengakuan status PLBN sebagai jalur ekspor-impor penuh oleh kedua negara menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran perdagangan. Dalam beberapa kasus, PLBN Aruk masih diposisikan sebagai jalur perdagangan tradisional, sehingga membatasi potensi ekspor komoditas bernilai tinggi seperti karet dan kelapa sawit. Di sisi lain, perkembangan sektor perkebunan di kawasan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari konsep agribisnis bilateral. Penguatan kerja sama agribisnis antara Indonesia dan Malaysia membuka peluang bagi peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, baik melalui integrasi rantai pasok, pengolahan bersama, maupun akses pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, PLBN Aruk berpotensi menjadi simpul agribisnis lintas negara yang menghubungkan produksi perkebunan di Kabupaten Sambas dengan pasar dan industri pengolahan di Malaysia.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai perdagangan lintas negara komoditas perkebunan melalui PLBN Aruk, dengan fokus pada ekspor karet dan kelapa sawit dari Kabupaten Sambas. Kajian ini menjadi penting untuk menilai peran PLBN Aruk, mengevaluasi kebijakan bea dan cukai yang diterapkan, serta menganalisis prospek pertumbuhan sektor perkebunan melalui pengembangan agribisnis bilateral Indonesia-Malaysia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan peran PLBN Aruk sebagai motor penggerak ekonomi perkebunan di wilayah perbatasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika perdagangan lintas negara komoditas perkebunan melalui PLBN Aruk, khususnya ekspor karet dan kelapa sawit dari Kabupaten Sambas, serta mengevaluasi kebijakan bea dan cukai yang diterapkan. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris sekaligus menganalisis keterkaitan antara kebijakan, praktik perdagangan, dan potensi pengembangan agribisnis bilateral. Sumber data yakni pejabat Bea dan Cukai di PLBN Aruk, pelaku

usaha karet dan kelapa sawit di Kabupaten Sambas serta dokumen berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan Teknik analisis yakni data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini melalui triangulasi sumber, triangulasi metode,

PEMBAHASAN

A. Peran PLBN Aruk dalam Perdagangan Lintas Negara Komoditas Perkebunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLBN Aruk memiliki posisi strategis sebagai pintu perdagangan lintas negara antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Keberadaan PLBN Aruk telah menyediakan sarana perdagangan resmi yang memungkinkan mobilitas barang lintas negara dilakukan secara legal, terkontrol, dan terintegrasi dengan fungsi kepabeanan, imigrasi, dan karantina. Dari sisi kebijakan nasional, PLBN Aruk dirancang untuk memperkuat ekonomi perbatasan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada jalur perdagangan informal. Namun demikian, dalam praktiknya, perdagangan komoditas perkebunan unggulan seperti karet dan kelapa sawit melalui PLBN Aruk masih belum optimal. Aktivitas perdagangan yang berlangsung cenderung didominasi oleh komoditas kebutuhan harian dan perdagangan skala kecil. Ekspor komoditas perkebunan dalam jumlah komersial masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PLBN Aruk sebagai jalur ekspor strategis belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan potensi ekonomi daerah.

Dari perspektif ekonomi wilayah perbatasan, keterbatasan pemanfaatan PLBN Aruk mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya perkebunan Kabupaten Sambas dan kapasitas kelembagaan serta infrastruktur perdagangan lintas negara. Hal ini berdampak pada tingginya biaya logistik dan terbatasnya akses pasar bagi pelaku usaha perkebunan lokal.

B. Evaluasi Kebijakan Bea dan Cukai di PLBN Aruk

Hasil kajian terhadap kebijakan dan implementasi bea dan cukai menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan kepabeanan di PLBN Aruk telah dirancang untuk mendukung perdagangan lintas negara. Prosedur administrasi ekspor telah diatur melalui sistem pelayanan terpadu yang bertujuan mempermudah arus barang lintas batas. Hal ini mencerminkan fungsi bea dan cukai sebagai fasilitator perdagangan selain sebagai instrumen pengawasan.

Namun, dari sisi efektivitas, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas kepabeanan, khususnya sarana pendukung ekspor komoditas perkebunan skala besar seperti terminal kargo internasional dan fasilitas penyimpanan, menjadi hambatan utama.

Akibatnya, ekspor karet dan kelapa sawit melalui PLBN Aruk belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat perbedaan pengakuan dan harmonisasi kebijakan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. PLBN Aruk dalam praktiknya masih lebih banyak diposisikan sebagai jalur perdagangan tradisional, bukan sebagai pintu ekspor-impor penuh. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses pasar dan menurunkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan PLBN Aruk sebagai jalur utama ekspor komoditas perkebunan.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Ekspor Karet dan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil analisis, faktor penghambat optimalisasi ekspor karet dan kelapa sawit melalui PLBN Aruk dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu infrastruktur, regulasi, dan kelembagaan. Dari aspek infrastruktur, keterbatasan fasilitas ekspor dan logistik menjadi kendala utama dalam pengiriman komoditas perkebunan dalam volume besar. Dari aspek regulasi, ketidaksinkronan kebijakan lintas negara menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan PLBN masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor pendukung yang berpotensi mendorong pengembangan ekspor komoditas perkebunan melalui PLBN Aruk. Faktor tersebut antara lain ketersediaan bahan baku perkebunan yang melimpah di Kabupaten Sambas, kedekatan geografis dengan pasar Malaysia, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Faktor-faktor ini menjadi modal penting dalam mendorong penguatan perdagangan lintas negara berbasis komoditas perkebunan.

D. Proyeksi Pertumbuhan Sektor Perkebunan melalui Agribisnis Bilateral

Berdasarkan analisis tren perdagangan dan potensi pasar regional, sektor perkebunan Kabupaten Sambas memiliki prospek pertumbuhan yang cukup positif apabila didukung oleh penguatan agribisnis bilateral Indonesia-Malaysia. Pengembangan kerja sama agribisnis lintas negara dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas karet dan kelapa sawit, tidak hanya sebagai bahan mentah, tetapi juga melalui integrasi rantai pasok dan pengolahan bersama.

PLBN Aruk berpotensi berfungsi sebagai simpul agribisnis bilateral yang menghubungkan produksi perkebunan di Kabupaten Sambas dengan pasar dan industri pengolahan di Malaysia. Dalam jangka menengah dan panjang, optimalisasi PLBN Aruk sebagai jalur ekspor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk memiliki peran strategis dalam mendukung perdagangan lintas negara, khususnya bagi pengembangan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Sambas seperti karet dan kelapa sawit. Keberadaan PLBN Aruk secara normatif telah membuka akses perdagangan resmi antara Indonesia dan Malaysia serta berpotensi memperkuat perekonomian wilayah perbatasan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan PLBN Aruk sebagai jalur ekspor komoditas perkebunan masih belum optimal. Keterbatasan infrastruktur pendukung ekspor, belum harmonisnya kebijakan kepabeanan lintas negara, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi perdagangan komoditas perkebunan melalui PLBN Aruk. Akibatnya, aktivitas perdagangan yang berlangsung masih didominasi oleh komoditas kebutuhan harian dan perdagangan skala kecil.

Di sisi lain, potensi pengembangan perdagangan komoditas perkebunan melalui PLBN Aruk masih sangat besar, didukung oleh ketersediaan bahan baku perkebunan, kedekatan geografis dengan pasar Malaysia, serta komitmen pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi PLBN Aruk memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan infrastruktur, harmonisasi kebijakan bea dan cukai, serta peningkatan kerja sama agribisnis bilateral Indonesia-Malaysia. Dengan langkah tersebut, PLBN Aruk dapat berfungsi secara efektif sebagai simpul perdagangan lintas negara dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi perkebunan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Sambas dalam angka*. BPS Kabupaten Sambas.
- Badan Pengelola Perbatasan Nasional. (2021). *Laporan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN)*. Jakarta: BNPP RI.
- Bea dan Cukai Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan dan prosedur kepabeanan di kawasan perbatasan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Boediono. (2018). *Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, S. (2019). Perdagangan lintas batas dan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 145–160.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Peluang dan tantangan ekspor komoditas perkebunan Indonesia*. Jakarta: Kemendag RI.

- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Boston: Pearson Education.
- Mubyarto. (2017). *Ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Porter, M. E. (2008). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
- Saragih, B. (2010). *Agribisnis: Paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). New York: Pearson.
- Yuniarti, R., & Pratama, A. (2020). Peran kebijakan kepabeanan dalam mendukung perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 67–82.